



▶ PELANGGARAN PERDA

## Mayoritas Tempat Hiburan Belum Tertib Izin

UMBULHARJO—Komisi A DPRD Kota Jogja menemukan sebagian besar tempat hiburan malam di kota ini belum tertib perizinan.

Arig Fajar Hidayat  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama Satpol PP di sejumlah titik menunjukkan sekitar 60% usaha hiburan malam masih bermasalah dalam kelengkapan izin operasionalnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, mengatakan inspeksi

▶ Sekitar 60% usaha hiburan malam masih bermasalah dalam kelengkapan izin operasionalnya.

▶ Jika tidak ada perbaikan, Dewan akan merekomendasikan penutupan sementara tempat hiburan yang melanggar.

tersebut dilakukan untuk memastikan usaha hiburan malam berjalan sesuai aturan, bukan untuk menekan pelaku usaha. Menurutnya, kegiatan ini lebih berorientasi pada edukasi agar para pengusaha memahami pentingnya regulasi

dan tertib administrasi. "Kami temukan ada yang izinnya mati, ada yang baru proses perpanjangan, bahkan ada yang mengira cukup dengan mendaftar di OSS [Online Single Submission] sudah dianggap memiliki izin. Padahal tidak begitu," ujar Antoro saat ditemui, Senin (27/10).

Dalam dua pekan terakhir, Komisi A bersama Satpol PP telah melakukan sidak di kawasan Jogja utara dan selatan, termasuk di sekitar Prawirotaman yang dikenal sebagai kawasan wisata malam. Berdasarkan hasil pengecekan di tujuh lokasi, ditemukan berbagai pelanggaran administrasi, mulai dari izin usaha yang belum diperbarui hingga klasifikasi

tempat yang tidak sesuai ketentuan.

Antoro menegaskan para pengusaha diberikan waktu tujuh hari untuk menertibkan izin usahanya. Jika dalam tenggat waktu itu tidak ada perbaikan, Dewan akan merekomendasikan penutupan sementara tempat hiburan yang melanggar.

"Kami bekerja sama dengan Satpol PP. Kalau peringatan tidak diindahkan, kami tidak segan merekomendasikan penutupan sementara," katanya.

Meski demikian, Antoro menilai sebagian besar tempat hiburan malam tetap membayar pajak, bahkan beberapa sudah menggunakan sistem transaksi digital yang terhubung dengan BPKAD.

Namun, ia mengakui masih ada ketidaksesuaian antara data perizinan dan catatan pajak daerah.

"Kami akan sandingkan data dari hasil sidak dengan BPKAD untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak daerah," ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Jogja, R. Candra Akbar Ishmata, menambahkan bahwa sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap penegakan peraturan daerah serta pengelolaan pajak di sektor hiburan malam. "Tujuannya memastikan semua usaha hiburan malam di Jogja beroperasi sesuai aturan dan tertib administrasi," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005